

TRANSFORMASI PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SANGGAU MELALUI RENCANA INDUK KELITBANGAN DAN KUALITAS RISET YANG UNGGUL

**Ludovicus Manditya Hari Christanto¹, Suharyo Joko Purnomo²,
Firda Islamaya Farhan³**

^{1,3} Pendidikan Geografi, Universitas Tanjungpura Pontianak

² Fungsional Perencana Ahli Madya, Bappeda, Jawa Tengah

¹ Email: hari_christanto@ymail.com

² Email: suharyojoko8@gmail.com

³ Email: firdafarhan0512@gmail.com

ABSTRAK

Rencana Induk Kelitbangan (RIK) memainkan peran penting dalam mendorong inovasi dan optimalisasi kinerja pemerintah daerah. Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 mengamanatkan penyusunan RIK sebagai dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi dan rincian indikasi program selama lima tahun. Tujuannya adalah memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintah Daerah. Perlu disusun kerangka kebijakan kelitbangan yang komprehensif dan sinergis melalui RIK Kabupaten Sanggau sebagai arahan dalam mendukung percepatan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berdaya saing. Metode kegiatan yang digunakan adalah pendekatan ceramah, sharing, dan sosialisasi. Diharapkan RIK dapat memenuhi harapan dan kebutuhan para pemangku kepentingan di Kabupaten Sanggau.

Kata Kunci: Rencana Induk Kelitbangan; Percepatan Pembangunan; Sosialisasi.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) International License.

ABSTRACT

The Research and Development Master Plan plays an important role in driving innovation and optimizing local government performance. Permendagri Number 17 of 2016 mandates the preparation of RIK as an R&D policy direction document that contains strategies and detailed program indications for five years. The aim is to provide input in the preparation of mid-term planning documents and accommodate the needs of Research and Development programs within the scope of Regional Government. It is necessary to formulate a comprehensive and synergistic research and development policy framework through Sanggau Regency RIK as a direction in supporting the acceleration of regional development that is right on target and competitive. The activity method used is the lecture approach, sharing, and outreach. RIK is expected to meet the expectations and needs of stakeholders in Sanggau Regency.

Keyword: *Research and Development Master Plan; Accelerated development; Socialization.*

PENDAHULUAN

Penelitian dan pengembangan memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis bukti empiris dan ilmu pengetahuan. Pasal 219 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Badan Litbang Daerah merupakan badan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di tingkat daerah. Saat ini, Badan Litbang Daerah telah terbentuk di berbagai tingkatan, yang diharapkan dapat menjadi daya dorong bagi

penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas. Fungsi penelitian dan pengembangan merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Fungsi ini diperlukan untuk menjawab tantangan dan dinamika dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi dalam optimalisasi kinerja pemerintah daerah dan percepatan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berdaya saing.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sanggau adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang penelitian, pengkajian, dan pengembangan untuk mendukung kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Perencanaan kelitbangan diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan sumberdaya yang terbatas. Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 mengamanatkan Rencana Induk Kelitbangan sebagai dokumen arah kebijakan kelitbangan yang memuat strategi, pentahapan, dan rincian indikasi program dalam kurun waktu 5 tahun. Tujuannya adalah memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah agar dapat mengakomodir kebutuhan program Kelitbangan dalam lingkup Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah bukanlah satu-satunya aktor yang mendorong inovasi, usahawan juga dapat menjadi aktor utama dalam pengembangan inovasi. Selain pemerintah, sektor lain yang berinvestasi dalam kelitbangan adalah perusahaan, perguruan tinggi, organisasi nirlaba non-pemerintah, dan pembiayaan luar negeri. Oleh karena itu, Rencana Induk Kelitbangan juga harus memperhatikan sinergi dan kolaborasi antar aktor tersebut.

Maka dari itu, diperlukan kerangka kebijakan kelitbangan pemerintah daerah yang komprehensif dan sinergis melalui Rencana Induk Kelitbangan Kabupaten Sanggau untuk mendukung optimalisasi kinerja pemerintah daerah dan percepatan pembangunan daerah yang tepat sasaran dan berdaya saing. Diharapkan hasil kelitbangan Kabupaten Sanggau dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan di lingkup Kabupaten Sanggau. Hasil penelitian menjadi dasar perumusan strategi yang dilakukan oleh OPD dalam memecahkan permasalahan isu strategis yang mendukung kebijakan dan strategi pembangunan wilayah di Kabupaten Sanggau dengan kualitas riset yang baik dalam penyusunan dokumen Rencana Induk Kelitbangan.

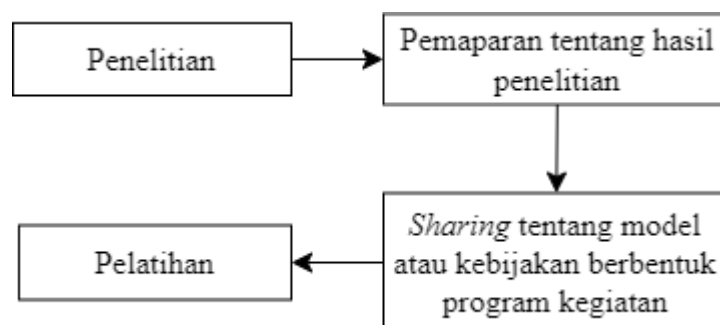
METODE PENELITIAN

Pelaksanaan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan merupakan bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) oleh tim Program Studi Pendidikan Geografi yang memberikan Penyuluhan Rencana Induk Kelitbangan dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Riset sebagai Acuan dalam Pembangunan Wilayah di Kabupaten Sanggau. Kegiatan ini di ditujukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilaksanakan di Kecamatan Sanggau, Kabupaten Sanggau selama 5 hari mulai tanggal 12 September 2022 sampai 16 September 2022.

Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang digunakan meliputi 4 (empat) metode yang disajikan pada bagan di **Gambar 1**.



Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah

1. Penelitian

Untuk membuat program kegiatan di Litbang Bappeda Sanggau, dilakukan penelitian awal dengan metode survey intansional untuk mengidentifikasi permasalahan, isu strategis, output kelitbangan, waktu pelaksanaan, dan kajian yang relevan. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang diberikan kepada OPD terkait.

2. Pemaparan tentang Hasil Penelitian

Metode ini dipilih untuk menyampaikan draft laporan akhir hasil penelitian kepada Litbang Bappeda Sanggau sebagai bagian dari Penyuluhan Rencana Induk Kelitbangan untuk Peningkatan Kualitas Riset sebagai Acuan Pembangunan Wilayah di Kabupaten Sanggau. Metode adalah media penyampaian program kegiatan terkait.

3. *Sharing* tentang Model atau Kebijakan Berbentuk Program Kegiatan

Metode ini dipilih sebagai media untuk berdiskusi tentang manfaat, kelebihan, kekurangan, dan pengembangan program kegiatan Rencana Induk Kelitbangan dalam mendukung peningkatan kualitas riset sebagai acuan dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Sanggau.

4. Pelatihan

Metode ini dipilih untuk melatih tim Litbang Bappeda Sanggau yang bertugas mengaplikasikan program kegiatan Rencana Induk Kelitbangan dalam mendukung peningkatan kualitas riset sebagai acuan dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Sanggau.

Metode yang Digunakan

Metode kegiatan yang digunakan adalah dengan pendekatan Ceramah, *Sharing* dan Sosialisasi. Ceramah dan *Sharing* dilakukan untuk menjelaskan tentang materi Dasar Dasar Dan Hasil Penyusunan Program Kelitbangan Dalam Dokumen Rencana Induk Kelitbangan serta Strategi Pelaksanaan Kelitbangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah

Arah kebijakan dan strategi pembangunan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Sanggau Tahun 2005-2025. Adapun dari 7 (tujuh) misi dalam RPJPD, misi ke-1 (satu) yaitu “Mewujudkan Kualitas Sumber daya Manusia) adalah yang paling relevan dengan kelitbangan. Misi ini diarahkan pada beberapa pencapaian sasaran pokok yang berfokus pada pencapaian kualitas sumber daya manusia yang disajikan pada **Tabel 1**.

**Tabel 1. Pencapaian Sasaran Pokok Berdasarkan Misi 1
“Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia”**

No	Pencapaian
1	Meningkatnya kualitas SDM, yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (GDI).
2	Meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan percepatan diwilayah perdesaan dan perbatasan negara.
3	Meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan.
4	Meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha
5	Meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin
6	Memantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian

- masyarakat.
 - 7 Meningkatkan dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang
 - 8 Meningkatkan karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri.
 - 9 Meningkatkan karakter masyarakat bermoral berdasarkan Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
-

PJPD memiliki empat tahapan dengan periode lima tahun untuk setiap tahapannya. Tahapan yang berkaitan dengan Rencana Induk Kelitbangan adalah RPJMD tahap ke-4, yang berlangsung dari tahun 2019 hingga 2024. Adapun sasaran pembangunan RPJMD tahap ke-4 yang menjadi agenda prioritas disajikan pada **Tabel 2**.

Tabel 2. Agenda Prioritas RPJMD Tahap ke-4

No	Agenda Prioritas RPJMD Tahap ke-4
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi,
2	Meningkatnya jumlah wirausahawan baru, dan meningkatnya peranan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah..
3	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
4	Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur untuk mendukung mobilitas orang dan barang/jasa di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau
5	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang yang serasi, sehingga proses dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh warga di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau.
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya hayati bagi kelangsungan hidup manusia dan meningkatnya upaya konservasi yang dilakukan pemerintah daerah
7	Berkembangnya sektor pertanian yang berbasis pada komoditas pertanian, perkebunan yang memberikan nilai tambah tinggi dan pariwisata yang berbasis alam, ekologi, dan budaya.
8	Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dengan berpegang pada AMDAL yang ketat.
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
10	Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.

Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 mengatur tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Kegiatan kelitbangan di Kabupaten/Kota terdiri dari kelitbangan utama dan pendukung. Kelitbangan utama terdiri dari 7 kegiatan seperti penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Pelaksanaan kelitbangan

utama bertujuan untuk menghasilkan kualitas yang baik, *outcome* yang baik dan mendukung inovasi. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan disusun berdasarkan visi kelitbangan dan kebijakan strategi jangka panjang daerah Kabupaten Sanggau tahun 2005-2025, arah kebijakan strategi jangka menengah Kabupaten Sanggau tahun 2019-2024 dan arah kebijakan Badan Litbang Kementerian dalam Negeri, sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2016. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah disajikan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Arah Kebijakan dan Strategi Kelitbangan Daerah

No	Arah Kebijakan	Strategi
1	Meningkatkan kegiatan-kegiatan kelitbangan agar berorientasi pada pemecahan masalah (<i>problem solving</i>) yang berkembang dengan jaminan mutu hasil kelitbangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi dan pemetaan persoalan serta hambatan pembangunan yang dihadapi untuk menyusun strategi penyelesaian persoalan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan 2. Perumusan tema prioritas serta target output sesuai tujuan dari masing-masing capaian kinerja untuk periode 5 (lima) tahun kedepan sehingga rencana kelitbangan merupakan kegiatan yang terintegrasi dan berkelanjutan. 3. Pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan dan daya saing daerah, serta dukungan pencapaian prioritas daerah. 4. Penetapan indikator keluaran baku sesuai standar pelaporan kelitbangan bagi seluruh pelaku kelitbangan, baik di lembaga kelitbangan maupun satuan kerja pemerintah daerah lainnya. 5. Peningkatan pelibatan publik dalam menguji dan menilai hasil kelitbangan melalui berbagai skema, seperti diseminasi hasil penelitian 6. Peningkatan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah dalam upaya peningkatan fasilitas dan hasil kelitbangan
2	Meningkatkan dan mengembangkan budaya inovasi dan kualitas sumber daya manusia dalam penelitian dan pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun budaya inovasi dan kreativitas melalui strategi jangka panjang via sistem pendidikan dan pembelajaran, pengembangan kurikulum dan pelatihan, serta melalui strategi jangka pendek via pengembangan ekosistem technopreneur, inkubator inovasi kelitbangan dan bisnis, ruang-ruang diskusi IPTEK, penciptaan role model, penyediaan beragam bentuk insentif, dan apresiasi. 2. Optimalisasi dukungan aspek regulasi, kelembagaan dan alokasi anggaran yang mendorong inovasi dan kelitbangan daerah 3. Penguatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kelitbangan khususnya pemenuhan kebutuhan Pejabat Fungsional Peneliti secara bertahap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Peningkatan dan pendampingan dalam hilirisasi hasil hasil produk dengan melibatkan stakeholders terkait (Pemerintah, Akademisi, Swasta dan Masyarakat
3	Meningkatkan kinerja lembaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan dan penguatan kerjasama kelitbangan antara Pemerintah, Akademisi, Swasta dan Masyarakat

<p>kelitbangan dengan mendorong penguatan aspek sumber daya manusia, pembiayaan, dan kerjasama dengan aktor-aktor kelitbangan lainnya, khususnya perguruan tinggi dan sektor swasta</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mendorong kerjasama kelitbangan dengan berbagai Lembaga/institusi kelitbangan 3. Pengembangan kerjasama sektoral berbasis potensi unggulan daerah Kabupaten Sanggau dengan lembaga kelitbangan yang sesuai dengan kompetensinya 4. Penguatan kerjasama dan sinergitas dengan instansi terkait di lingkup Pemerintah Kabupaten Sanggau maupun institusi/lembaga kelitbangan, beserta aktor-aktor kelitbangan lainnya, sehingga hasil kelitbangan dapat bersinergi satu dengan lainnya.
<p>4 Meningkatkan penerapan dari hasil-hasil kelitbangan baik dalam bentuk perekayasaan maupun evaluasi kebijakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan difusi dan desiminasi pengembangan inovasi daerah. 2. Peningkatan pemanfaatan hasil litbang oleh pemda, dunia usaha dan dunia industri 3. Peningkatan aksesibilitas informasi hasil-hasil kelitbangan 4. Peningkatan penerapan Sistem Inovasi Daerah 5. Pengembangan basis data (database) dan sistem informasi manajemen terkait data dan informasi daerah, hasil-hasil kelitbangan daerah.

Indikasi Program Prioritas Kelitbangan Daerah

Program prioritas kelitbangan disusun dengan mengidentifikasi isu-isu pokok yang berkembang di Kabupaten Sanggau, yang dirumuskan sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri No. 17 Tahun 2016, yaitu: 1) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik, 2) Sosial dan Kemasyarakatan, 3) Ekonomi dan Pembangunan Daerah dan 4) Inovasi dan Pengembangan IPTEK. Penetapan program prioritas kelitbangan di Pemerintah Kabupaten Sanggau dilakukan dengan melakukan survei ke perangkat daerah untuk memperoleh data kelitbangan. Penetapan program prioritas juga harus disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Sanggau Tahun 2019-2024 dan Rencana Strategis masing-masing Perangkat Daerah.

Selain itu, penetapan program dan kegiatannya mengacu pada Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan demikian, program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik di Pemerintah Kabupaten Sanggau. Terdapat strategi dalam melaksanakan penyusunan program prioritas kelitbangan yang disajikan pada **Tabel 4, Tabel 5, dan Tabel 6.**

Tabel 4. Program Prioritas Bidang Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

No	Strategi Program
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis, dan berbudaya tinggi,
2	Meningkatnya jumlah wirausahawan baru, dan meningkatnya peranan UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah..
3	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan yang telah disusun dan semakin berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru
4	Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur untuk mendukung mobilitas orang dan barang/jasa di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau
5	Meningkatnya optimalisasi pemanfaatan ruang yang serasi, sehingga proses dan hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh warga di seluruh wilayah Kabupaten Sanggau.
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumber daya hayati bagi kelangsungan hidup manusia dan meningkatnya upaya konservasi yang dilakukan pemerintah daerah
7	Berkembangnya sektor pertanian yang berbasis pada komoditas pertanian, perkebunan yang memberikan nilai tambah tinggi dan pariwisata yang berbasis alam, ekologi, dan budaya.
8	Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dengan berpegang pada AMDAL yang ketat.
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)
10	Terciptanya supremasi hukum dan penegakan HAM yang bersumber pada peraturan perundangan yang berlaku yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif dan aspiratif.

Tabel 5. Program Prioritas Bidang Sosial dan Kemasyarakatan

No	Strategi Program
1	Fasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh izin secara aman, cepat dan real time.,
2	Pengembangan media pembelajaran dalam mengasah kompetensi dasar.
3	Peningkatan kapasitas dan kualitas dalam mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing.
4	Masyarakat Tangguh bencana.
5	Mewujudkan tatanan hidup yang sejahtera melalui peningkatan kualitas hidup.
6	Pengarusutamaan perspektif gender dalam pembangunan
7	Peningkatan efektivitas penanganan PMKS.
8	Peningkatan daya saing tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja yang layak
9	Peningkatan aksesibilitas terhadap pengembangan kualitas prestasi dan budaya olahraga.
10	Peningkatan produktivitas sektor pariwisata
11	Peningkatan efektifitas pengelolaan kearsipan.
12	Peningkatan pelayanan publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan

Tabel 6. Program Prioritas Ekonomi dan Pembangunan Daerah

No	Strategi Program
1	Peningkatan industri pertanian yang terintegrasi hulu-hilir
2	Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian dan perikanan.
3	Peningkatan ketersediaan pangan bagi masyarakat guna menjamin tersedianya pangan.
4	Peningkatan kualitas dan kuantitas sektor unggulan daerah
5	Peningkatan jumlah pelaku usaha UMKM yang berkualitas
6	Peningkatan ketersediaan, pemerataan dan aksesibilitas infrastruktur dasar.
7	Peningkatan jalan untuk mendukung pembangunan kawasan
8	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perhubungan.
9	Peningkatan optimalisasi manajemen pengelolaan persampahan dengan memanfaatkan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendukung persampahan.
10	Peningkatan luasan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
11	Peningkatan pengelolaan informasi dan kerjasama komunikasi publik

Tingkat Pemahaman Organisasi Perangkat Daerah

Tingkat Pemahaman Organisasi Perangkat Daerah Di Kabupaten Sanggau dengan permasalahan, isu strategis, strategi, program dan kegiatan serta kajian dalam Rencana Induk Kelitbangan di Kabupaten Sanggau dilihat dari masukan yang diberikan dalam penyempurnaan dokumen Rencana Induk Kelitbangan di Kabupaten Sanggau. Tingkat pemahaman OPD dalam memahami materi penyuluhan termasuk baik, hal itu ditunjukkan dari keaktifan peserta dalam memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan penyempurnaan dokumen Rencana Induk Kelitbangan di Kabupaten Sanggau. Hal tersebut diuraikan pada **Tabel 7**.

Tabel 7. Tingkat Pemahaman OPD Dilihat dari Masukan yang Diberikan

Saran/Tanggapan dan Masukan	Keterangan
"Tambahkan skala prioritas program prioritas kelitbangan pada tabel BAB 3 untuk setiap tahun."	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
"Hirarki penulisan dasar hukum: UU-PP-Permen-Perda-Perbup."	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM
Air bersih dimasukkan dalam Dinas Bina Marga	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
"Perbaiki Indikator Program Prioritas Kelitbangan di Dinas Pangan dan Perikanan: Indeks Ketahanan Pangan dan Persentase Jumlah."	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan
Untuk inspektorat terdapat 2 isu strategis	Inspektorat
"Penggantian Indikator Program Kelitbangan: Fokus pada Pengembangan Kapasitas LKD, LPM, dan Lembaga Adat."	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
"Isu BKPSDM: Uji Kognitif dan Pemetaan ASN untuk Promosi dan Permutasi."	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
"Perbaiki Program Prioritas Kelitbangan IPTEK	Dinas Perindustrian,

dan Inovasi: Penyesuaian Isu Strategis untuk Industri dan Usaha Menengah."	Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
"Pemetaan Potensi ASN dalam RPJMD Kabupaten Sanggau: Penerapan Model Aplikasi untuk Output Rekomendasi."	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
"Usulan Perencanaan di Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan, dan Perindustrian."	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
"Proses Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) untuk Mengelola Litbang."	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
"Perbaikan Visi Kelitbang Kabupaten Sanggau: Unggul dan Berdaya Saing."	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM

SIMPULAN

Dalam pencapaian sasaran penyelenggaraan pemerintahan yang optimal di Kabupaten Sanggau, diperlukan kebijakan berkualitas yang didukung oleh data valid, informasi faktual, dan hasil analisis yang akurat. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan memiliki peran penting dalam menetapkan skenario kebijakan strategis di daerah. RIK (Rencana Induk Kelitbang) Kabupaten Sanggau 2023-2027 adalah dokumen arah kebijakan kelitbang yang berisi strategi dan indikasi program di seluruh perangkat daerah. Tujuannya adalah memberikan masukan untuk penyusunan RPJMD berikutnya dan meningkatkan kualitas kebijakan daerah berbasis kelitbang. Rencana Induk kelitbang Kabupaten Sanggau tahun 2023- 2027 telah memuat program dan kegiatan yang harapannya bisa diterjemahkan kedalam rencana kerja tiap tahunnya oleh pemerintah Kabupaten Sanggau dan rencana kerja masing-masing perangkat daerah, sehingga implementasinya dapat terlaksana dengan baik. Dokumen Rencana Induk Kelitbang ini perlu dilakukan review sebelum penyusunan dokumen rencana panjang jangka menengah Daerah (RPJMD) periode berikutnya. Hal tersebut bertujuan agar rancangan-rancangan program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen Rencana Induk Kelitbang dapat dijadikan acuan untuk pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

SARAN

Adapun rekomendasi penelitian maupun pengembangan Rencana Induk Kelitbang yang akan dilakukan selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Induk Kelitbang (RIK) dapat menjadi rujukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Sanggau berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang ada;

2. Rencana Induk Kelitbangan dapat menjadi dokumen pelengkap dalam pembentukan Badan Riset Inovasi Daerah (BRIDA) di Kabupaten Sanggau;

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Lembaran RI Tahun 2014. No. 23. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Kabupaten Sanggau. 2019. Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sanggau 2019-2024. BAPPEDA . Kabupaten Sanggau
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016. Nomor 17. Jakarta